

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Asshiddiqie, Jimly. 2004, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta : UII Press.

Barthos, Basir. 1990, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara: Rutin dan Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Fauzan, Muhammad. 2012, *Hukum Lembaga Negara Mahkamah Agung dalam perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta : Kanwa Publisher.

Hadi, M. 1980. *Administrasi Keuangan Negara RI*, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kansil,CST, 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Moerdiono. 1992, *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan : Beberapa Pemikiran Pemecahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ridwan, Juniarso. 2010. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa.

Rosadi, Oton, 2004. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Praktek*. Padang : universitas Ekasakti.

Sosromidjojo, Madenan. 1963. *Administrasi Keuangan, Perbendaharaan, Dan Pengawasan Keuangan*, Yogyakarta.

Subagio, M. 1991, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali.

Yani, Ahmad. 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Tentang Hal Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

Internet

<http://www.rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>

